

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Qatar adalah salah satu Negara di Jazirah arab yang berbatasan langsung dengan Negara Bahrain di sebelah barat, Uni Emirat Arab di sebelah timur, dan Arab Saudi di sebelah selatan. Negara ini tergantung pada sector gas alam cair dan minyak sebagai sumber pendapatan. Berdasarkan *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank* Qatar merupakan salah satu Negara kaya dan maju dengan PDB \$168 Milliyar(2017), PDB Per Kapita \$116936(2017)<sup>1</sup>, Qatar sekarang banyak menjadi perhatian dunia karena perekonomiannya yang meningkat dan tumbuh dengan cepat dari penghasilan Ekspor gas alam cair dan minyak, rata-rata Negara di kawasan timur tengah mengandalkan minyak sebagai penghasilan utama Negara, tapi, berbeda dengan Qatar yang lebih menonjolkan gas alam cair dari pada minyak seperti Negara-negara timur tengah lainnya.

Qatar juga menjadi perhatian dunia karena politik dan pengaruhnya di kawasan timur tengah, sehingga banyak pihak Negara lain merasa terancam karena pengaruh Qatar semakin luas, Keikutsertaan Qatar dalam Organisasi GCC di bidang ekonomi mampu meingkatkan perekonomian

---

<sup>1</sup>Indikator Ekonomi [online], dalam <http://id.tradingeconomics.com>, diakses pada tanggal 9 Juli 2018

Qatar dengan banyak mengekspor Gas Alam (LNG) ke Negara-negara anggota GCC dan Negara timur tengah lainnya. Qatar juga mengajukan diri sebagai tuan rumah FIFA World, dan sering menjadi Tuan rumah Konferensi-konferensi dan Summit Internasional.

Qatar tumbuh menjadi Negara maju secara ekonomi dan makin mengancam posisi Politik Arab Saudi di kawasan. Munculnya Qatar sebagai sebagai emerging actor juga mendatangkan kecemburuan politik bagi Arab Saudi yang selama ini menjadi “polisi” di kawasan Timur Tengah. Sejak tahun 2000-an, Qatar muncul menjadi Negara paling aktif di kawasan Timur Tengah dan Afrika, Qatar selalu hadir sebagai Negara mediator dalam konflik di Libanon, Sudan, Yaman, Libya, Mesir, Palestina, Djiboti, hingga Eritrea.

Namun, Eksistensi Qatar menjadi Negara paling berpengaruh kedua setelah Arab Saudi banyak mendatangkan kecemburuan politik bagi Negara-negara tetangganya terlebih Arab Saudi, Hubungan Arab Saudi dan Qatar memang sudah lama tidak berjalan mulus semenjak Tamim mengudeta kekuasaan ayahnya pada 1990-an, negara yang paling gelisah adalah Arab Saudi. Kudeta ini dianggap menyalahi norma-norma suksesi kekuasaan di negara- negara Teluk. Kegelisahan itu berlanjut pada upaya Arab Saudi membangun aliansi dari keluarga kerajaan Al-Thani untuk mengudeta Emir Hamad pada 1996 dan mengembalikan kekuasaan Qatar pada Emir Khalifa bin Hamad al-Thani. Manuver politik Arab Saudi membuat hubungan diplomatik Qatar berada pada titik nadir karena

tindakan Arab Saudi didukung kebanyakan pemimpin Timteng yang tak mengakui pemerintahan Emir Hamad.

Posisi Qatar yang terisolasi dukungan diperparah dengan pendanaannya terhadap Ikhwanul Muslimin di Mesir, Qatar dianggap mendukung kelompok terorisme yang mengancam stabilitas keamanan negara-negara teluk dan melanggar perjanjian GCC, karena mendanai kelompok terorisme adalah menentang prinsip kepemimpinan dinasti yang banyak dianut negara-negara Teluk, akibatnya pada 5 Maret 2014 Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain menarik Duta Besarnya dari Qatar.

Setelah pemutusan hubungan diplomatic pada tahun 2014, ketiga negara tersebut kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Qatar sampai tahun 2017, tetapi suhu panas politik kembali memanas berawal dari pernyataan palsu (fake statement) Emir Qatar Tamim bin Hamad Khalifa al-Thani ketika apel militer di media resmi pemerintah, Qatar New Agency (QNA), pada tanggal 23 Mei 2017, yang diretas pihak tak bertanggung jawab. Di sana, Tamim menyinggung isu-isu sensitif di Timur Tengah tentang potensi runtuhnya pemerintahan Donald Trump dan menganggap Iran sebagai "kekuatan Islam besar". Dari kontennya, tentu pernyataan ini memiliki risiko sangat fatal dan efek diplomatik serius. Pertama, pernyataan diucapkan ketika efek "Trump" masih hangat karena dia beberapa hari sebelumnya melakukan lawatan ke Arab Saudi. Kedua, menyatakan Iran great Islamic power mengindikasikan pernyataan diplomatik yang kuat akan keberpihakan Qatar terhadap Iran.

Fake statement tersebut sebenarnya merupakan pemantik di tengah kegerahan para penguasa Arab terhadap manuver Qatar<sup>2</sup>, sehingga pada tanggal 5 Juni 2017 Arab Saudi dan Bahrain kembali memutuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar, kemudian diikuti dengan beberapa negara Arab lainnya seperti Uni Emirat Arab, Mesir, dan Yaman. Namun krisis diplomatik tersebut dianggap gagal karena Qatar masih bertahan dalam menghadapi pemutusan hubungan diplomatik tersebut, lalu apa sebenarnya faktor yang mendorong Kebijakan Qatar Bertahan dalam Krisis Diplomatik 2017?.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: Mengapa Qatar mengeluarkan Kebijakan dalam Krisis Diplomatik Tahun 2017?.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui faktor-faktor yang mendorong Kebijakan Qatar dalam Krisis Diplomatik Tahun 2017.

---

<sup>2</sup>Wahyudhi, Nostalgawan, 2017, *Membonsai Qatar* [online], dalam <https://kompas.id>, diakses pada tanggal 11 Januari 2018

## **D. Landasan Teori**

### **1. Politik Luar Negeri**

Politik Luar Negeri pada dasarnya merupakan “action theory”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu.<sup>3</sup> Secara umum Politik Luar Negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu – isu internasional atas lingkungan sekitarnya.

Politik Luar Negeri merupakan salah satu bidang kajian studi dalam Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek – aspek eksternal, tetapi juga aspek – aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor – aktor non-negara semakin penting peranannya dalam hubungan internasional.<sup>4</sup>

Dalam kajian Politik Luar Negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang

---

<sup>3</sup>Perwita, Banyu Anak Agung dan Yanyan Mohammad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya. Hlm 47

<sup>4</sup>Ibid, Hlm.48

mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Politik Luar Negeri nantinya akan menghasilkan suatu kebijakan luar negeri. Yang mana kebijakan luar negeri itu dijalankan oleh pemerintah suatu negara yang memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara – negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. lebih lanjut menurut Rosenau, apabila kita akan memasuki fenomena yang luas

---

<sup>5</sup>James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York : The Free Press, hal. 171, 173

dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal need) termasuk di dalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut, nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, intitusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara – bangsa.

Dalam melaksanakan politik luar negeri sering disinggung pengertian – pengertian mengenai pandangan hidup bangsa, kepentingan nasional, sasaran, kebijaksanaan, kewajiban dan prinsip. Kepentingan nasional ialah tujuan umum yang dari semula sampai tingkat terakhir diperjuangkan oleh suatu bangsa.<sup>6</sup>

Politik Luar Negeri tentunya memiliki sebuah tujuan. Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampumeluaskan pengaruhnya kepada negara – negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain.

K.J Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan – tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu :

1. Nilai (values) yang menjadi tujuan dari pembuat keputusan.

---

<sup>6</sup>Jusuf,Suffri.*Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*.Pustaka Sinar Harapan.Jakarta.1989.hal 114

2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

Konsep lain yang melekat pada tujuan politik luar negeri adalah kepentingan nasional (national interest) yang didefinisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori / keinginan suatu negara yang berdaulat. Kepentingan Nasional terbagi dalam beberapa jenis :

1. Core/ basic/ vital interest; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya.
2. Secondary interest; meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing – masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan misalnya.

## **2. Faktor Pendorong Politik Luar Negeri**

### **a. Faktor Pendorong Menurut K.J Holsti**

Dalam mencapai Politik Luar negeri diperlukan kebijakan luar negeri, menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari

lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut. Sehingga pendapat Holsti dapat diperjelas dengan pengkalsifikasian bahwa politik luar negeri dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni :

1) Faktor Eksternal

Faktor-faktor non domestik suatu negara yang memengaruhi negara dalam melakukan politik luar negeri atau mengeluarkan kebijakan luar negeri. Struktur sistem internasional, kebijakan dari negara lain, masalah global dan regional sektor privat, hukum internasional dan opini publik global merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Adapun faktor eksternal tersebut meliputi :

- a. Struktur sistem internasional, yaitu tatanan internasional, unipolar, bipolar, atau multipolar. Situasi ini berpengaruh pada pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, terlebih bagi negara – negara yang berada pada pengaruh negara besar atau negara pusat polar.
- b. Karakteristik atau struktur ekonomi internasional, faktor ini terdiri dari tiga hal yaitu struktur ekonomi global, masih dalam keadaan polaritas atau sudah mengalami globalisasi. Selanjutnya peran rezim ekonomi internasional dan keadaan ekonomi global saat itu.

- c. Kebijakan aktor atau negara lain, faktor ini adalah bentuk tanggapan atau respon dari negara lain di luar negara atau aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan luar negeri.
- d. Masalah global dan regional sektor privat, merupakan masalah yang dilakukan oleh aktor non-negara atau aktor privat. Masalah yang dimaksud adalah masalah kontemporer dalam hubungan internasional.
- e. Hukum internasional dan opini publik, kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh hukum internasional yang berlaku pada negara tersebut juga opini publik global terkait kebijakan yang akan dikeluarkan.

## 2) Faktor Internal

Faktor domestik yang mempengaruhi negara dalam menyusun politik luar negeri. Kebutuhan sosioekonomi atau kebutuhan keamanan, karakteristik geografi dan topografi, opini publik domestik, struktur pemerintah dan filosofi, birokrasi, dan pertimbangan etik merupakan faktor internal atau domestik yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Adapun faktor internal tersebut meliputi :

- a. Kebutuhan sosioekonomi atau keamanan adalah faktor yang memengaruhi keadaan sosio ekonomi atau keamanan domestik negara.

- b. Karakteristik geografi dan topografi, kondisi geografi dan topografi sangat memengaruhi keadaan sosial domestik.
- c. Atribut nasional adalah karakteristik atau ciri umum suatu negara, keikutsertaan suatu negara terhadap suatu forum atau organisasi. Karakteristik umum ini akan memengaruhi bentuk kebijakan luar negeri suatu negara.
- d. Struktur pemerintahan dan filosofi, struktur pemerintahan dan falsafah yang dianut oleh sebuah negara secara langsung akan memengaruhi cara pengambilan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan.
- e. Opini publik, yang dimaksud adalah pendapat masyarakat yang memiliki kebebasan dalam berpendapat. Holsti menjelaskan untuk mengetahui sejauh mana pendapat masyarakat berpengaruh harus dilihat dari siapa yang berpendapat, pada isu apa, dan bagaimana pendapatnya.
- f. Birokrasi, hal ini tertuju bagaimana proses perumusan kebijakan luar negeri dirumuskan dan bagaimana kerjasama antar elemen dalam pemerintahan dalam merumuskan kebijakan.

g. Pertimbangan etik adalah pertimbangan yang dilakukan oleh negara agar tujuan kepentingan nasional dari kebijakan luar negeri yang dikeluarkan tercapai.

b. Faktor Pendorong Menurut Howard Lentner

Diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu :

1) Determinan Luar Negeri

Mengacu pada keadaan,

a. Sistem Internasional

Pola interaksi di antara negara – negara yang terbentuk/ dibentuk oleh struktur interaksi diantara pelaku – pelaku yang paling kuat (most powerful actors)

b. Situasi Pada Suatu Waktu Tertentu

Pola – pola interaksi yang tidak tercakup/ mencakup keseluruhan sistem internasional.

Secara ringkas dapat dikatakan situasi sebagai suatu alat analisis (analytical tool) dapat memberikan alat untuk menentukan lingkungan internasional (eksternal) yang relevan bagi para pembuat keputusan (decision-makers). Selain itu, konsep ini juga berfungsi sebagai alat untuk mrnghubungkan dua unit analisis yang lainnya yaitu negara dan sistem internasional. Manfaat penggambaran kondisi lingkungan internasional ini, yaitu dapat memberikan setting (latar

belakang) munculnya peristiwa – peristiwa dalam politik luar negeri, serta dapat membantu memunculkan faktor – faktor yang menghambat dan mendukung (constraining and facilitating factors) dalam interaksi antar negara.

## 2) Determinan Domestik.

Menunjuk pada keadaan di dalam negeri yang terbagi ke dalam tiga kategori berdasarkan waktu untuk berubah, yaitu :

1. Highly stable determinants; terdiri atas luas geografi, lokasi, bentuk daratan, iklim, populasi, serta sumber daya alam.
2. Moderately stable; terdiri atas budaya politik, gaya politik, kepemimpinan politik, dan proses politik.
3. Unstable determinants; yaitu sikap dan persepsi jangka panjang serta faktor – faktor ketidaksengajaan.

## c. Faktor Pendorong Menurut James N. Rosenau

1. Faktor eksternal,
  - a. Faktor sistemik, menjelaskan struktur hubungan antar negara – negara besar, pola – pola aliansi yang terbentuk antar negara – negara.

## 2. Faktor Internal,

- a. Masyarakat, mencakup faktor kebudayaan, dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik terhadap dunia luar.
- b. Pemerintahan, yang menjelaskan tentang pertanggungjaawaban politik dan struktur dalam pemerintahan.
- c. Idiosinkratik, persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai.

## 3. **Krisis Diplomatik**

Krisis Diplomatik adalah Suatu Negara memutuskan hubungan diplomatik dengan suatu Negara lain, pemutusan hubungan tersebut termasuk penarikan duta besar, memberlakukan larangan perdagangan, perjalanan dan menutup seluruh akses jalur darat, laut, maupun udara.

Skripsi ini akan menggunakan Landasan Teori Faktor Pendorong Politik Luar Negri menurut K.J Holsti yang mengklasifikasikan bahwa Politik Luar Negri dipengaruhi 2 faktor yakni : Faktor Internal dan Eksternal suatu Negara, dalam studi kasus skripsi ini akan menganalisa Faktor Internal dan Eksternal Kebijakan Qatar dalam Krisis Diplomatik 2017.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata – kata dan bukan rangkaian angka. Sedangkan penelitian deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek – praktek yang berlaku.
3. Membuat perbandingan atau evaluasi.<sup>7</sup>

### **2. Jenis Data dan Sumbernya**

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung dari aktor – aktor terkait misalnya aktor negara. Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari berbagai literatur.

### **3. Teknik Pengumpula Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen dengan cara mengumpulkan berbagai macam sumber

---

<sup>7</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 22.

informasi dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Sumber literatur tersebut diantaranya: buku, jurnal, dokumen, makalah, surat kabar, artikel dan internet.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan urutan :

- a. Reduksi Data, yaitu proses menyempurnakan data, baik mengurangi data yang dirasa kurang relevan maupun menambah data yang dirasa masih kurang.
- b. Penyajian Data, Penyajian data di sini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berbentuk teks naratif, sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data. Proses ini dijelaskan bagaimana mulai mencari makna terkait factor yang melatarbelakangi sikap Qatar bersikukuh dalam menghadapi pemutusan hubungan diplomatic Arab Saudi dan Negara Teluk lainnya pada tahun 2017.

**F. Sistematika Penulisan**

**BAB I        PENDAHULUAN**

**BAB II        GAMBARAN UMUM PEMUTUSAN HUBUNGAN  
DIPLOMATIK ARAB SAUDI DENGAN QATAR  
TAHUN 2017**

**A. Gambaran Umum Negara Qatar.**

**B. Sejarah Hubungan Diplomatik Qatar dengan Arab  
Saudi.**

**C. Gambaran umum Pemutusan Hubungan  
Diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar.**

**BAB III        FAKTOR PENDORONG KEBIJAKAN QATAR  
DALAM KRISIS DIPLOMATIK TAHUN 2017**

**A. Faktor Internal**

**A.1. Jaminan Penjualan Minyak Bumi dan Gas  
Alam ke Negara lain**

**A.2. Diversifikasi Sumber Ekonomi dari Sektor Non-  
Migas**

**A.2.1. Qatar Science and Technology Park  
(QSTP)**

**A.2.2. Qatar Financial Centre**

**A.3. Daya Tahan Sektor Transportasi terhadap  
Krisis Diplomatik**

## **B. Faktor Eksternal**

**B.1. Alternatif Jalur Penerbangan**

**B.2. Jaminan Pasokan Makanan dari Luar**

**B.3. Daya Tahan Sektor Perdagangan terhadap  
Krisis Diplomatik**

**B.4. Pembelaan Donald Trump terhadap Arab Saudi**

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

